

TUGAS AKHIR

**ARAHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN
PESISIR KOTA GORONTALO**

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Strata Satu (S1)

Oleh :

Muhammad Anugrah Rahman

133060017



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2018

**ARAHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN
PESISIR KOTA GORONTALO**

TUGAS AKHIR



Nama : Muhammad Anugrah Rahman

NRP : 133060017

Mengetahui/Menyetujui:

Pembimbing Utama

Co-Pembimbing

Dr. Ir. Firmansyah, MT.

Furi Sari Nurwulandari, ST., MT.

**ARAHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN
PESISIR KOTA GORONTALO**

**Disusun Oleh:
Muhammad Anugrah Rahman
133060017**

Bandung, Oktober 2018

Menyetujui:

Dr. Ir. Firmansyah, MT.	(Pembimbing Utama)	:	...
Furi Sari Nurwulandari, ST., MT.	(Co-Pembimbing)	:	...
Ir. Supratignyo Aji, MT.	(Penguji)	:	...
Ir. Jajan Rohjan, MT.	(Penguji)	:	...

Mengetahui:

Koordinator Tugas Akhir

Ketua Program Studi

Dr. Ir. Firmansyah, MT.

Ir. Reza Martani Surdia, MT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi	8
1.5 Batasan Studi	8
1.6 Metodologi	9
1.6.1 Metode Pendekatan	9
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	9
1.6.3 Metode Analisis	14
1.7 Sistematika Laporan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Permukiman dan Perumahan	23
2.1.1 Hakikat Permukiman dan Perumahan	24
2.1.2 Hakikat Permukiman Kumuh	27
2.1.3 Perkembangan Permukiman Kumuh	30

2.2 Permukiman Kumuh	32
2.2.1 Penyebab Perkembangan Permukiman Kumuh	32
2.2.2 Tipologi Permukiman Kumuh.....	34
2.2.3 Proses Perkembangan permukiman Kumuh.....	37
2.2.4 Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh	38
2.3 Pola Pengembangan Kawasan Pesisir	40
2.4 Permukiman Wilayah pesisir	42
2.4.1 Perkembangan Kota Pesisir.....	42
2.4.2 Karakteristik Permukiman Wilayah Pesisir.....	44
2.5 Penanganan Permukiman Kumuh	45
2.5.1 Pendekatan Penanganan UU No.1 Tahun 2011	45
2.5.2 Pendekatan Berdasarkan Legalitas Tanah	47
2.5.3 Program Penanganan Permukiman Kumuh.....	49
2.6 Variabel, Aspek, Kriteria, dan Parameter dalam Penelitian.....	51
2.7 Studi Terdahulu.....	57
BAB III GAMBARAN UMUM	67
3.1 Gambaran Umum Eksternal	67
3.1.1 Geografis dan Administrasi.....	67
3.1.2 Kondisi Fisik	68
3.1.3 Kependudukan dan Ekonomi	69
3.1.4 Arahan Kebijakan Permukiman	74
3.2 Gambaran Umum Internal (Leato Utara dan leato Selatan).....	76
3.2.1 Karakteristik Fisik dan Geografis	78
3.2.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	83
3.2.3 Kondisi Permukiman Pesisir	89
BAB IV ANALISIS KEKUMUHAN	114
4.1 Identifikasi Kondisi Kekumuhan	114
4.1.1 Kondisi Bangunan	114
4.1.2 Kondisi Jaringan Jalan.....	121
4.1.3 Kondisi Air Minum	124

4.1.4 Kondisi Drainase Lingkungan.....	125
4.1.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	130
4.1.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan.....	131
4.1.7 Kondisi Proteksi Kebakaran.....	134
4.2 Identifikasi Legalitas Tanah.....	137
4.3 Identifikasi Pertimbangan Lain.....	140
4.4 Skoring Tingkat Kekumuhan.....	142
4.5 Prioritas Penanganan.....	150
4.6 Arahan Penanganan Permukiman Kumuh.....	151
BAB V KESIMPULAN & REKOMENDASI	158
6.1 Kesimpulan.....	158
6.2 Rekomendasi.....	159
6.3 Kelemahan Studi.....	159
6.4 Studi Lanjutan.....	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIEAN	164



ABSTRAK

Kota menjadi pusat pertumbuhan dan konsentrasi segala kebutuhan yang dibutuhkan bagi manusia. Pusat bisnis dan jasa, kelengkapan fasilitas, serta hiburan menjadi suatu magnet yang kuat di perkotaan tak terkecuali untuk pengembangan permukiman yang dekat dengan pesisir. Hingga saat ini, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di wilayah pesisir (meliputi areal 50 km dari garis pantai) dan dua pertiga dari kota-kota di Indonesia berlokasi di wilayah pesisir (Dahuri et al. 1996). Perkembangan kota menimbulkan permasalahan keruangan, salah satunya adalah perumahan dan permukiman. Permasalahan ini terjadi juga pada permukiman pesisir di Kota Gorontalo (Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan) dengan kondisi permukiman tidak layak. Tujuan dari penelitian ini memberikan bentuk-bentuk arahan dalam perspektif spasial terhadap penanganan permukiman kumuh yang aplikatif sesuai dengan karakteristik khas pada kawasan pesisir Kota Gorontalo yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan penanganan kumuh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melihat indikator kekumuhan dan faktor penyebab permukiman kumuh, serta didukung dengan arahan spasial melalui maping dengan Arc GIS tools. Hasil dari penelitian ini pada Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan kawasan permukiman masuk dalam kategori kumuh dari kategori rendah, sedang, sampai tinggi. Bentuk penanganannya terbagi menjadi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali (relokasi) pada perumahan yang berada pada kawasan lindung dan tidak sesuai arahan pemanfaatannya. Mayoritas bangunan tidak memiliki izin, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk memfasilitasi legalisasi izin bangunan.

Kata kunci: Kumuh, Permukiman Pesisir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota pesisir menjadi daerah yang paling strategis dan pesat pertumbuhannya, alasannya daerah pesisir memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya darat tetapi juga sumber daya laut. Pesisir memiliki sumber daya yang sangat beragam dan penting bagi kelangsungan suatu peradaban. Sekitar 60% kota yang ada di Indonesia terletak di daerah pesisir (Dahuri, 2002). Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai lansekap, habitat alam, dan sejarah yang tinggi. Sehingga menjadi magnet yang kuat tak terkecuali untuk pengembangan kota pesisir. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat. Berbagai pembangunan pada kawasan pertumbuhan bukan hanya membawa nilai positif bagi peningkatan perekonomian daerah tapi juga membawa dampak negatif yang muncul.

Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan jumlah menjadikan daerah kota semakin sempit, termasuk ketersediaan lahan untuk permukiman. Lahan permukiman apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan masalah yang tidak lepas dari permasalahan terkait kepadatan dan kekumuhan. Saat ini kawasan pesisir masih memiliki *image* sebagai daerah yang terbelakang, kumuh, dan kurang tersentuh dikarenakan perkembangan wilayah pesisir yang kurang menjadi perhatian utama. Hal ini terlihat dari kondisi sarana prasarana yang tidak mendukung seperti air bersih, persampahan, pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Akibat terbentuknya permukiman kumuh yang disebabkan urbanisasi masyarakat yang tidak terkendali serta ketidak siapan pemerintah dalam menyediakan permukiman beserta sarana dan prasarana yang layak menjadi satu penyebab munculnya kawasan kumuh di perkotaan yang dipandang berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Permukiman kumuh yang muncul juga akan mengurangi nilai estetika suatu kota dan dianggap tidak mendukung

untuk nilai estetika dari suatu kota yang menjadi faktor penting dalam penilaian kota tersebut. Pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan memang identik dengan wilayah pesisir, di mana ada permukiman di wilayah perbatasan tersebut pasti memiliki daerah kumuh yang berkembang. Hal ini terlihat dari beberapa kota pesisir seperti Kampung Luar Batang dan Pasar Ikan di Jakarta dan daerah Kenjeran di pesisir Kota Surabaya.

Masalah permukiman dengan ciri permukiman dan kepadatan yang tinggi. Permukiman perkotaan yang padat ini menjadi pemicu masalah klasik yang dialami kota-kota di Indonesia atau bahkan di kota-kota besar dunia sekalipun. Masalah yang sering muncul dari permukiman dengan kepadatan yang tinggi adalah kekumuhan. Permukiman kumuh merupakan polemik, kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Penyebab tumbuhnya permukiman kumuh akibat tidak seimbangnya pertambahan jumlah perumahan yang disediakan di kota dengan pertumbuhan penduduknya. Kekurangan jumlah rumah ini biasanya diakibatkan karena terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk secara alami ataupun karena faktor urbanisasi. Urbanisasi tersebut timbul akibat adanya perkembangan ekonomi kota yang pesat. Seringkali keberadaan mereka diperkotaan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk bersaing yang memadai. Padahal kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat dan jumlah lapangan pekerjaan sangat terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian besar kaum urban mengalami kegagalan. Para kaum urban yang gagal, biasanya tidak mampu membeli rumah yang layak. Sehingga mereka terpaksa harus berada di tempat-tempat yang tidak layak.

Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadi pusat pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dengan menjadi daerah pengembangan strategis yang menjadikan Kota Gorontalo berkembang sangat pesat dari segi investasi ekonomi, infrastruktur, hingga peningkatan jumlah penduduk. Kota Gorontalo sebagai salah satu kota berkembang tentunya tak luput dari permasalahan keruangan khususnya permasalahan khas perkotaan, sehingga membutuhkan suatu perencanaan penataan ruang yang dapat mengakomodir perkembangan ekonomi serta penanganan permasalahan yang muncul. Perencanaan diperlukan dalam

pembangunan kota di mana suatu kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Terkait dengan permasalahan keruangan yang muncul khususnya masalah perumahan dan permukiman, Kota Gorontalo diketahui memiliki masalah terkait dengan perumahan dan permukiman. Dalam Rapat Konsesus (Konsultasi Publik) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo, teridentifikasi kawasan kumuh di Kota Gorontalo seluas 159,3 ha. Di mana sebelumnya hanya ada 6 kelurahan yang teridentifikasi kumuh, namun setelah dilakukan identifikasi ulang, terdapat 2 kelurahan di Kecamatan Dumbo Raya yang memiliki kawasan kumuh, yakni Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara, yang letaknya di daerah pesisir. Dalam jurnal dengan judul “Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo”, yang di tulis oleh Heryati tahun 2008, diketahui bahwa luas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Leato Utara menempati urutan pertama dengan luas mencapai 1,2 Ha.

Berdasarkan fakta dan pernyataan di atas bahwasanya potensi perkembangan kawasan kumuh di kawasan pesisir perlu adanya penelitian tentang permukiman kumuh khususnya pada daerah pesisir Kota Gorontalo. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis (UU No.1 Tahun 2011).

1.2 Rumusan Permasalahan

Bertolak dari hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi urgensi pada penelitian ini terkait dengan permukiman kumuh pada kawasan pesisir Kota Gorontalo yang memiliki fungsi strategis sebagai pelabuhan dan juga terkait cita kawasan perkotaan Gorontalo khususnya pada daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh kondisi permukiman

semrawut dan tidak teratur, berikut uraian permasalahan utama pada lokasi studi sebagai berikut:

1. Perkembangan kota yang pesat sedang lahan perkotaan yang tidak bertambah ditambah faktor geografis daerah pesisir dan berbukit sehingga lahan untuk dibangun menjadi sangat terbatas. Masyarakat dengan mayoritas bekerja sebagai nelayan membangun hunian pada lahan sempit dan kawasan terlarang yang dapat berpengaruh terhadap degradasi terhadap kualitas lingkungan hunian. Hidup di tengah permukiman kumuh, masyarakat semakin dekat dengan masalah khususnya terkait kesehatan lingkungan serta kelengkapan sarana dan prasarana permukiman. Maka perlu identifikasi kondisi eksisting dan penilaian tingkat kekumuhan lingkungan hunian yang terjadi di kawasan pesisir Kota Gorontalo.
2. Fungsi strategis sebagai kawasan pelabuhan dan juga menjadi jalur penghubung antar provinsi, dengan kondisi permukiman yang tidak layak huni dapat mempengaruhi nilai estetika dan citra kota disamping banyak masalah lainnya yang mungkin muncul akibat kumuh, sehingga memberikan kesan perkampungan kumuh. Agar masalah tidak menjadi begitu kompleks dan berat untuk menanggulangi kekumuhan permukiman daerah perkotaan, dibutuhkan langkah penanganan dalam penanggulangan daerah permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Gorontalo.

Fungsi strategis sebagai pintu masuk baik dari jalur laut melalui pelabuhan penyebrangan dan jalur darat antar provinsi ini sehingga berpengaruh pada citra kawasan pesisir Kota Gorontalo yang terkesan kumuh. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, dapat diambil pertanyaan inti penelitian ini adalah **“Bagaimanakah bentuk penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Gorontalo?”**.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Melihat penegasan-penegasan dalam latar belakang serta permasalahan kota yang terjadi, penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan arahan penanganan

pada permukiman kumuh di wilayah pesisir Kota Gorontalo dalam menangani kawasan kumuh di Kota Gorontalo.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dalam mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting permukiman kumuh pada Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan.
2. Teridentifikasinya tingkat kekumuhan pada setiap blok perumahan berdasarkan analisis identifikasi lokasi permukiman kumuh meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain (kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya), sesuai dengan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016.
3. Teridentifikasinya arahan penanganan permukiman kumuh wilayah pesisir yang sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh pada lokasi kajian.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal penelitian ini perlu diberikan batasan baik wilayah dan substansi meteri dalam ruang lingkup penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dipilih salah satunya didasarkan dari isu permasalahan dan kemudian dikaitkan dengan lokasi kajian. Pada penelitian ini fokus kajian yakni terkait dengan permukiman di kawasan pesisir di Kota Gorontalo. Secara makro terdapat 2 Kecamatan yang berada di pesisir Kota Gorontalo, yakni Kecamatan Hulonthalangi dengan dua kelurahan yang berbatasan langsung yakni Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Kramat, sedangkan untuk Kecamatan Dumbo Raya terdapat Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan.

Dalam penentuan ruang lingkup wilayah ini peneliti menitikberatkan pada daerah yang memiliki konsentrasi bangunan dan jumlah penduduk pada kawasan pesisir serta juga nilai strategis dari lokasi tersebut. Maka, jika dilihat dari faktor tersebut yang cocok untuk dikaji terkait kekumuhan adalah Kecamatan Dumbo Raya dengan lokus Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan. Jumlah

penduduk dan kepadatannya serta konsentrasi bangunan di kawasan pesisir yang cukup masif dibandingkan dengan kawasan pesisir di kecamatan lain, disamping itu daerah ini memiliki nilai strategis sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dengan fungsi utama pelabuhan yang merupakan pintu masuk jalur laut dengan adanya pelabuhan penyeberangan, sehingga dapat mempengaruhi citra kota yang dimunculkan oleh permukiman tersebut yang dapat memberi dampak negatif dalam penilaian *image* Kota Gorontalo. Daerah ini memang memiliki beberapa nilai strategis seperti berkaitan dengan pelabuhan penyeberangan orang dan barang, menjadi jalur alternatif jaringan jalan antar provinsi, hingga menjadi jalur akses utama menuju beberapa destinasi wisata andalan di Provinsi Gorontalo.

Kota Gorontalo merupakan daerah administratif di Provinsi Gorontalo yang geografisnya terletak di antara 00.28'.17" – 00.35'.56" Lintang Utara dan 122.59'.44" Bujur Timur. Memiliki luas 79,03 km² dan terbagi dalam 9 kecamatan dan 50 kelurahan dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Kecamatan Kota Selatan
2. Kecamatan Kota Utara
3. Kecamatan Kota Tengah
4. Kecamatan Kota Timur
5. Kecamatan Duingi
6. Kecamatan Kota Barat
7. Kecamatan Hulonthalangi
8. Kecamatan Sipatana, dan
9. Kecamatan Dumbo Raya

Sedangkan ruang lingkup wilayah studi mikro yakni Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Dumbo Raya yang berada di kawasan pesisir Kota Gorontalo. Kecamatan Dumbo Raya yang ada di kawasan pesisir Kota Gorontalo ini memiliki luas 8,67 km². Kecamatan Dumbo Raya memiliki 5 kelurahan dan yang menjadi lokasi penelitian 2 kelurahan yakni Kelurahan Leato Utara luas 1,45 km² dan Kelurahan Leato Selatan dengan luas 2,06km². Kajian mikro pada Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan berbatasan langsung dengan:

- Utara : Kecamatan Talumolo dan Kabupaten Bone Bolango
- Timur : Kabupaten Bonebolango
- Barat : Laut Teluk Tomini
- Selatan : Laut Teluk Tomini



1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Kajian materi sebagai ruang lingkup materi yang dibahas ialah penataan permukiman kumuh yang menjadi salah satu permasalahan utama yang dimiliki oleh perkotaan pada umumnya akibat dari pertumbuhan kota yang tidak seimbang. Sehingga nantinya dapat mengatasi masalah klasik permukiman di perkotaan, khususnya di kawasan pesisir Kota Gorontalo.

1. Teridentifikasinya lokasi permukiman kumuh berdasarkan analisis identifikasi lokasi permukiman kumuh meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain (kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya). Dengan merujuk pada Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016, dengan variabel sebagai berikut:

- Kondisi Kekumuhan:
 - Kondisi bangunan
 - Kondisi jalan lingkungan
 - Kondisi air minum
 - Kondisi drainase lingkungan
 - Kondisi pengelolaan air limbah
 - Kondisi pengelolaan persampahan
 - Kondisi proteksi kebakaran
- Legalitas Tanah
 - Kesesuaian dengan rencana tata ruang
 - Kepemilikan tanah dan bangunan
- Pertimbangan Lain
 - Nilai strategis lokasi
 - Kepadatan penduduk
 - Kondisi sosial ekonomi.

2. Merumuskan arahan pola penanganan permukiman kumuh wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh wilayah kajian.

1.5 Batasan Studi

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan studi penelitian agar tidak melebar dan tetap fokus pada judul penelitian maka perlu ditetapkan batasan studi. Adapun batasan studi terkait lokasi penelitian mengambil Kecamatan Dumbo Raya yang memiliki 5 kelurahan namun mengambil fokus pada 2 kecamatan yang memiliki karakteristik kuat wilayah pesisir yakni, Kelurahan Leato Utara dan

Kelurahan Leato Selatan, kedua kelurahan permukiman pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai.

Selain batasan terkait administrasi, batasan substansi terkait analisis yang akan digunakan adalah penentuan lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang meliputi; (a) identifikasi lokasi, meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain; (b) penilaian lokasi, meliputi klasifikasi kondisi kekumuhan, klasifikasi legalitas tanah; dan (c) klasifikasi pertimbangan lain, meliputi nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk dan kondisi sosial ekonomi.

1.6 Metodologi

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penetapan kawasan permukiman kumuh ini menggunakan model penelitian deskriptif kuantitatif. Di mana dalam metode analisis deskriptif kuantitatif, pendekatan diawali dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai aspek terkait sehingga membentuk gambaran umum atau kondisi eksisting daerah kajian yang kemudian dianalisis untuk mengkaji tingkat kekumuhan lokasi dengan menggunakan pedoman dalam Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 sehingga dapat menjelaskan fakta di lapangan secara terstruktur dan baku dengan menggunakan variabel dan deskripsi statistik.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari melakukan survei langsung ke lapangan, untuk data sekunder diperoleh dari beberapa instansi atau dinas terkait atau data yang didapat dari penelitian sebelumnya.

A. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan untuk mengumpulkan persepsi dari responden terhadap suatu obyek penelitian. Sumber data diperoleh dari survei

lapangan langsung dengan mengamati obyek yang menjadi sasaran kajian. Adapun bentuk pengumpulan data primer yaitu :

- **Observasi Lapangan**, observasi lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mengamati kondisi eksisting seluruh wilayah yang dikaji, dalam hal ini terkait 2 kelurahan kajian yakni Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan dengan alat bantu *form* penilaian kekumuhan yang terkait dengan kondisi bangunan, jaringan jalan, dan drainase.
- **Dokumentasi**, yaitu dibuat untuk mendapatkan kondisi eksisting permukiman yang ada di 2 kelurahan kajian yakni Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan dan juga dapat menjadi bukti faktual terkait gambaran daerah kajian.
- **Wawancara/Interview**, wawancara dan tanya jawab dilakukan terhadap responden khususnya terhadap perangkat pemerintahan, dimulai dari dinas perumahan dan permukiman, Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan, hingga tingkatan RT/RW dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang representatif dan dianggap dapat melengkapi data terkait dengan kondisi atau gambaran permukiman setempat.
- **Kuisisioner**, penyebaran kuisisioner ini dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan yang terkait dengan status tanah dan bangunan, kondisi sanitasi/limbah, air minum, persampahan dan prasarana proteksi kebakaran.

➤ **Teknik Sampling**

Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama **teknik sampling atau teknik pengambilan sampel**. Sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan yaitu:

- Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan “bias” (kekeliruan) dalam sampel. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut.

- Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi.

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, yaitu metoda pemilihan *sampel probabilitas* dan metoda pemilihan *sampel non probabilitas*. Perbedaan pokok kedua metoda terletak pada probabilitas setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai subyek sampel.

Metoda probabilitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap elemen populasi untuk terpilih sebagai sampel dengan pemilihan sampel yang dilakukan secara acak. Metode non probabilitistik, memilih sampel secara tidak acak, sehingga setiap elemen populaasi mempunyai probabilitas yang berbeda untuk dipilih menjadi sampel. Uraian dari masing-masing metode sampling dapat dilihat pada tabel tabel I.1 berikut

Tabel I.1
Perbandingan Metode Sampling

Jenis Metode	Prinsip Metode	Karakteristik Responden
<i>Probability Sampling</i>		
<i>Simple Random Sampling</i>	Teknik sampel pengambilan sampel didasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor unit atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam dengan pemilihan responden secara acak tanpa memperhatikan strata	Responden dipilih secara acak dengan ketentuan jenis responden adalah homogen
<i>Non Probability Sampling</i>		
<i>Purposive Sampling</i>	Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu	Responden yang dipilih merupakan yang paham atau ahli dalam bidang terkait.

Berdasarkan tabel perbandingan metode sampling diatas didapatkan beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan data, yaitu metode *simple random sampling* dan *spurposive sampling*. Metode *simple random sampling* akan digunakan untuk mendapatkan data dari masyarakat berdasarkan setiap unsur dalam seluruh populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk

dipilih. Anggota sampel mudah dan cepat diperoleh. Sementara untuk metode *purposive sampling* diberi batasan dengan tidak memberi peluang yang sama dari tiap anggota populasi, khususnya digunakan untuk menggali data serta informasi dari instansi-instansi terkait. Adapun identifikasi karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (*Purposive Sampling*):

Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap instansi ini untuk mencari informasi terkait dengan profil kekumuhan di Kota Gorontalo. Informasi yang diharapkan dapat di dapatkan melalui wawancara dengan instansi seperti terkait perencanaan terhadap kawasan kumuh, pertanahan terkait dengan staus kepemilikan tanah, infrastruktur, hingga program penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo khususnya penanganan pada lokasi kajian. Adapun taerget wawancaranya setingkat kepal bidang/seksi atau staf yang betul memahami dan membidangi terkait informasi yang ingin didapatkan. Adapun target narasumber setingkat kepala bidang pada Dinas Tata Ruang & Permukiman, serta perangkat Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan leato Selatan seperti kepala bidang dan ketua Rukun Tetangga (RT) pada lokasi kajian unuk dapat menggali informasi yang dibutuhkan.

2. Masyarakat (*Simple Random Sampling*):

Pengumpulan data terhadap masyarakat melalui penyebaran kuisisioner pada 2 kelurahan kajian yakni Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik masyarakat untuk mengetahui informasi serta gambaran eksisting diantaranya terkait pekerjaan, kondisi hunian (air bersih dan limbah), status kepemilikan rumah, pengelolaan persampahan, prasarana proteksi kebakaran serta data serta informasi yang diperlukan dalam proses analisis terkait permukiman kumuh pada daerah kajian. Adapun form kuisisioner yang akan disebar terdapat pada lampiran.

➤ **Penetapan Sampel**

Dalam penetapan sampel ini peneliti menggunakan jumlah populasi berdasarkan jumlah kepala rumah tangga yang dipertimbangkan dapat menjadi representatis dari jumlah bangunan/rumah yang ada pada lokasi kajian. Kelurahan Leato Utara memiliki 491 rumah tangga dan Kelurahan Leato Selatan memiliki 540 rumah tangga. Adapun dalam penetapan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan metode Slovin. Penggunaan metode ini selain sudah banyak digunakan dalam proses penetapan sampling pada banyak penelitian terdahulu juga peneliti mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya baik materil maupun non materil dalam proses penelitian ini. Berikut uji penetapan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Ket :
 N = populasi (unit rumah tangga)
 n = Besar sampel
 d = $\infty = 0,05/0,1$

1. Kelurahan Leto Utara:

$$n = \frac{491}{1 + 491 (0,1^2)} = 83 \text{ rumah}$$

2. Kelurahan Leato Selatan:

$$n = \frac{540}{1 + 540 (0,1^2)} = 85 \text{ rumah}$$

Jadi, untuk Kelurahan Leato Utara membutuhkan sampel sebanyak 83 rumah tangga dan untuk Kelurahan Leato Selatan membutuhkan sampel sebanyak 85 rumah tangga, dengan *margin error* sebesar 10% atau dengan kata lain memiliki unsur validitas 90%. Untuk pembagian jumlah sampel setiap blok perumahan disesuaikan dengan banyaknya bangunan hunian dari setiap blok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I. 2
Jumlah Sampel Blok Perumahan di Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan

No.	Rukun Warga (RW)	Blok	Luas (Ha)	Jumlah Bangunan	Sampel (unit)
Kelurahan Leato Utara					
1.	RW 1	01-1	2,56	109	18
2.	RW 2	02-2	2,51	61	11
		02-3	2,75	89	15

No.	Rukun Warga (RW)	Blok	Luas (Ha)	Jumlah Bangunan	Sampel (unit)
		02-4	1,78	53	9
3.	RW 3	03-5	4,34	112	19
		03-6	2,06	67	11
Kelurahan Leato Selatan					
4.	RW 1	01-1	5,47	179	28
5.	RW 2	02-2	7,95	161	25
6.	RW 3	03-3	3,47	45	7
		03-4	3,15	102	17
		03-5	1,17	53	8

Sumber: Observasi 2017

B. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara di antaranya yaitu melalui studi pustaka atau studi literatur dengan cara mengkaji sumber teoritis berupa jurnal-jurnal, *text book*. Literatur yang digunakan antara lain yang memuat teori tentang permukiman pesisir, permukiman kumuh, penanganan bencana pesisir, relokasi, penataan kawasan, dan kajian lain yang terkait. Hasil dari survei sekunder ini dapat mendukung atau melengkapi hasil dari survei primer yang dilakukan.

Data sekunder berupa data spasial ataupun data tabular dari dinas atau instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Kantor Kecamatan, dan kantor kelurahan. Adapun data-data yang di butuhkan terkait dengan tutupan lahan, kesesuaian tata ruang, sarana prasarana lingkungan permukiman, kondisi kependudukan, vitalitas ekonomi, serta status tanah dan bangunan.

1.6.3 Metode Analisis

Dalam metode analisis dengan menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif kuantitatif, metode ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan keadaan suatu gejala dengan menggunakan alat ukur atau instrumen pengukuran yang kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga

memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Di mana dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menentukan tingkat kekumuhan di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan yang sebelumnya telah dibagi ke dalam blok-blok perumahan untuk memudahkan penelitian. Dalam analisis ini berkaitan dengan penilaian lokasi yang mengacu pada Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Identifikasi lokasi yakni dengan melakukan survei primer pada daerah kajian untuk memperoleh informasi yang kemudian digunakan menjadi data dalam menentukan skor dari setiap variabel dalam form identifikasi lokasi, adapun variabel dalam identifikasi lokasi ini adalah sebagai berikut. Dalam identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh diperlukan suatu formulasi penilaian terhadap suatu lokasi untuk melihat seberapa tingkat kekumuhan yang dialami lokasi tersebut, kemudian dapat menghitung daerah prioritas penanganan. Beberapa uraian terkait aspek serta kriteria perumahan dan permukiman kumuh terkait dengan identifikasi kondisi kekumuhan adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Kekumuhan

1. Kondisi Bangunan

- **Ketidakteraturan bangunan**

Ketidakteraturan bangunan, yang dilihat dari arahan dalam RDTR terkait konsep identitas lingkungan dan orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- **Tingkat kepadatan bangunan**

Tingkat kepadatan bangunan, dengan penilaian skoring kepadatan bangunan dengan rentang kepadatan tinggi 34-45 unit/ha, sedang 22-33 unit/ha, dan rendah 11-21 unit/ha.

- **Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat**

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, terkait dengan persyaratan bangunan gedung yakni memenuhi kecukupan luas minimal 60 m²/bangunan rumah. Pendekatan yang dilakukan yakni dengan pendekatan blok bangunan.

2. Kondisi Jalan Lingkungan

- **Cakupan pelayanan jalan lingkungan**

Cakupan Jaringan Pelayanan, luas lingkungan perumahan dan permukiman yang dilayani oleh jaringan jalan lingkungan.

- **Kualitas permukaan jalan lingkungan**

Kualitas Permukiman Jalan, yakni melihat kondisi permukaan jaringan jalan pada daerah kajian.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

- **Ketidakterediaan akses air minum**

Dari sub faktor penyediaan air minum memiliki indikator penilaian terkait kumuh yakni terkait ketersediaan akses aman (tidak berwarna, berbau, berasa) yang mana penyediaan air minum yang aman tersebut yakni menggunakan sumber air dari PDAM. Dalam membantu analisis ini peneliti menggunakan jumlah sampel rumah dari tiap blok untuk mendapatkan data terkait dengan penyediaan air minum bagi masyarakat.

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- **Ketidakmampuan mengalirkan air (Area Genangan)**

Area Genangan Air, yang merujuk pada genangan yang terjadi kurang dari 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2x setahun.

- **Cakupan pelayanan drainase lingkungan**

Cakupan Pelayanan Drainase, Luas lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak dilayani oleh jaringan drainase lingkungan.

- **Kualitas konstruksi drainase**

Kualitas Konstruksi Drainase, yakni terkait dengan kondisi saluran drainase yang ada apakah dapat berfungsi atau tidak.

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- **Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis**

Dari sub faktor kondisi pengelolaan air limbah dapat dilihat indikator utama yakni, prasarana dan sarana air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis. Adapun persyaratan teknis yang dimaksud adalah kloset leher angsa yang

terhubung dengan tangki septik. Dalam membantu analisis ini peneliti menggunakan jumlah sampel rumah dari tiap blok untuk mendapatkan data terkait dengan pengelolaan air limbah.

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- **Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis**

Prasaran dan Saran Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis, yakni terkait dengan kelengkapan sarana prasarana persampahan diantaranya tempat sampah, tempat pengumpulan sampah (TPS)/TPS 3R skala lingkungan, gerobak sampah skala lingkungan, tempat pengolahan sampah terpadu skala lingkungan.

- **Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar**

Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Teknis, yakni terkait dengan pola pengangkutan sampah dimana sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman tidak terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu.

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

- **Ketersediaan sarana proteksi kebakaran**

Ketersediaan Prasarana Proteksi Secara Aktif dan Pasif, hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan jaringan jalan lingkungan yang memadai bagi sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran.

- **Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran**

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran, yakni berupa hidrant air sebagai sumber pasokan air sebagai bagian proteksi kebakaran pada lingkungan padat bangunan.

b. Legalitas Tanah

1. Kejelasan Status Penguasaan Tanah

Status Tanah, yang terkait dengan izin mendirikan bangunan atau IMB dan akta atau kepemilikan tanah.

2. Kesesuaian RTR

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, rencana tata ruang yang dimaksud adalah terkait dengan kesesuaian pola ruang pada daerah kajian.

c. Pertimbangan Lain

1. Nilai strategis lokasi

Nilai Strategis Lokasi, yang dimaksud terkait dengan letak atau posisi strategis lokasi tersebut terhadap pengembangan kota secara keseluruhan.

2. Kependudukan

Kepadatan Penduduk, yakni terkait dengan jumlah serta kepadatan penduduk pada lokasi tersebut. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah <150 jiwa/ha, sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha, tinggi yaitu kepadatan penduduk antara >200 jiwa/ha.

3. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya

Potensi Lokal, yakni potensi lokal yang terdapat pada kawasan tersebut baik yang sudah dikembangkan maupun belum tersentuh yang dapat mendorong pembangunan ekonomi.

Berdasarkan 3 variabel utama diatas selanjutnya dilakukan skoring sesuai dengan parameter dari tiap kriteria dari tiga variabel utama yang kemudian hasil skoring dibagi berdasarkan klasifikasinya. Adapun klasifikasinya dari variabel kondisi kekumuhan, klasifikasi legalitas tanah dan klasifikasi pertimbangan lain adalah sebagai berikut.

A. Klasifikasi Kondisi Kekumuhan (Ringan, Sedang, dan Berat).

- ✓ Kumuh Berat
- ✓ Kumuh Sedang
- ✓ Kumuh Ringan

B. Klasifikasi Legalitas Tanah (Legal atau Tidak Legal)

- ✓ Legal
- ✓ Tidak Legal

C. Klasifikasi Pertimbangan Lain (Tinggi, Sedang, Berat).

- ✓ Pertimbangan Lain Tinggi
- ✓ Pertimbangan Lain Sedang

✓ Pertimbangan Lain Rendah

Setelah proses klasifikasi berdasarkan variabel, proses selanjutnya menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini berguna untuk menentukan daerah perumahan (dalam penelitian disebut blok) yang memiliki tingkat kekumuhan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan, skala prioritas ini mencerminkan kondisi tingkat kekumuhan, dimana skala prioritas 1 (satu) kondisi daerah lebih kumuh dibandingkan prioritas 2 (dua) dan begitu seterusnya. Adapun untuk memperoleh skala prioritas ini menggunakan penilaian yang menggabungkan antar variabel kondisi kekumuhan dan variabel pertimbangan lain. Untuk mempermudah peneliti telah membuat tabulasi prioritas penanganan berdasarkan Permen PUPR No.02/PRT/M/2016 seperti di bawah ini.

Tabel I.3
Penentuan Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

PRIORITAS PENANGANAN								
KUMUH BERAT	KUMUH SEDANG	KUMUH RINGAN	KUMUH BERAT	KUMUH SEDANG	KUMUH RINGAN	KUMUH BERAT	KUMUH SEDANG	KUMUH RINGAN
PERTIMB. TINGGI	PERTIMB. TINGGI	PERTIMB. TINGGI	PERTIMB. SEDANG	PERTIMB. SEDANG	PERTIMB. SEDANG	PERTIMB. RENDAH	PERTIMB. RENDAH	PERTIMB. RENDAH
Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Prioritas 8	Prioritas 9

Sumber: Permen PUPR No.02/PRT/M/2016

Penentuan skala prioritas ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan daerah-daerah yang teridentifikasi kumuh dalam serta membantu dalam penentuan rekomendasi penanganan yang sesuai. Adapun dari hasil skala prioritas dapat menghasilkan bentuk penanganan seperti pada tabel dibawah.

Tabel I.4
Rekomendasi Penanganan Kawasan Kumuh

BENTUK PENANGANAN KAWASAN					
Prioritas 1 / 4 / 7	Prioritas 1 / 4 / 7	Prioritas 2 / 5 / 8	Prioritas 2 / 5 / 8	Prioritas 3 / 6 / 9	Prioritas 3 / 6 / 9
LEGAL	TIDAK LEGAL	LEGAL	TIDAK LEGAL	LEGAL	TIDAK LEGAL

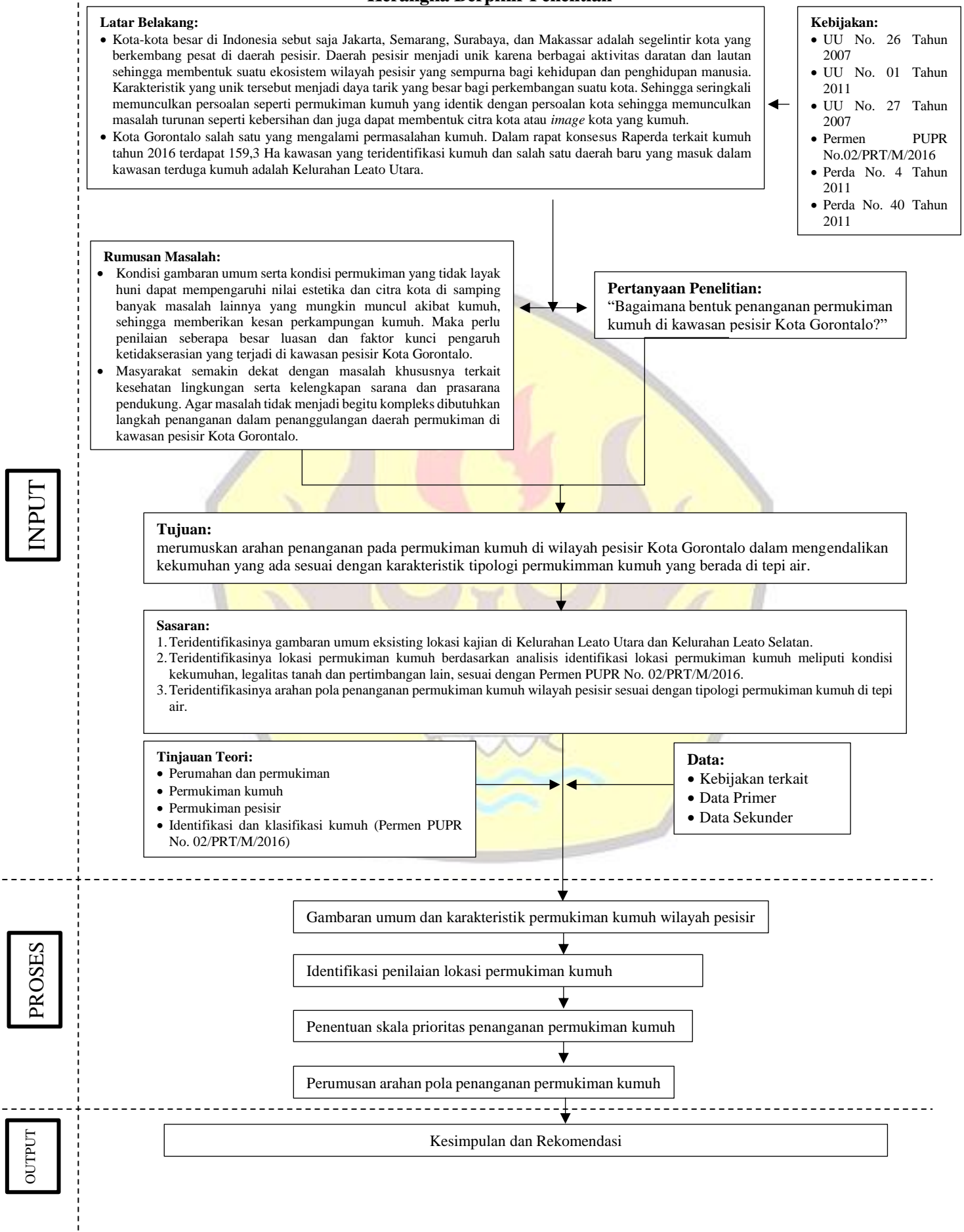
Permukiman Kembali atau Peremajaan	Permukiman Kembali atau Legalisasi Lahan + Peremajaan	Peremajaan	Permukiman Kembali atau Legalisasi Lahan + Peremajaan	Peremajaan	Permukiman Kembali atau Legalisasi Lahan + Pemugaran
---	--	-------------------	--	-------------------	---

Sumber: Permen PUPR No.02/PRT/M/2016

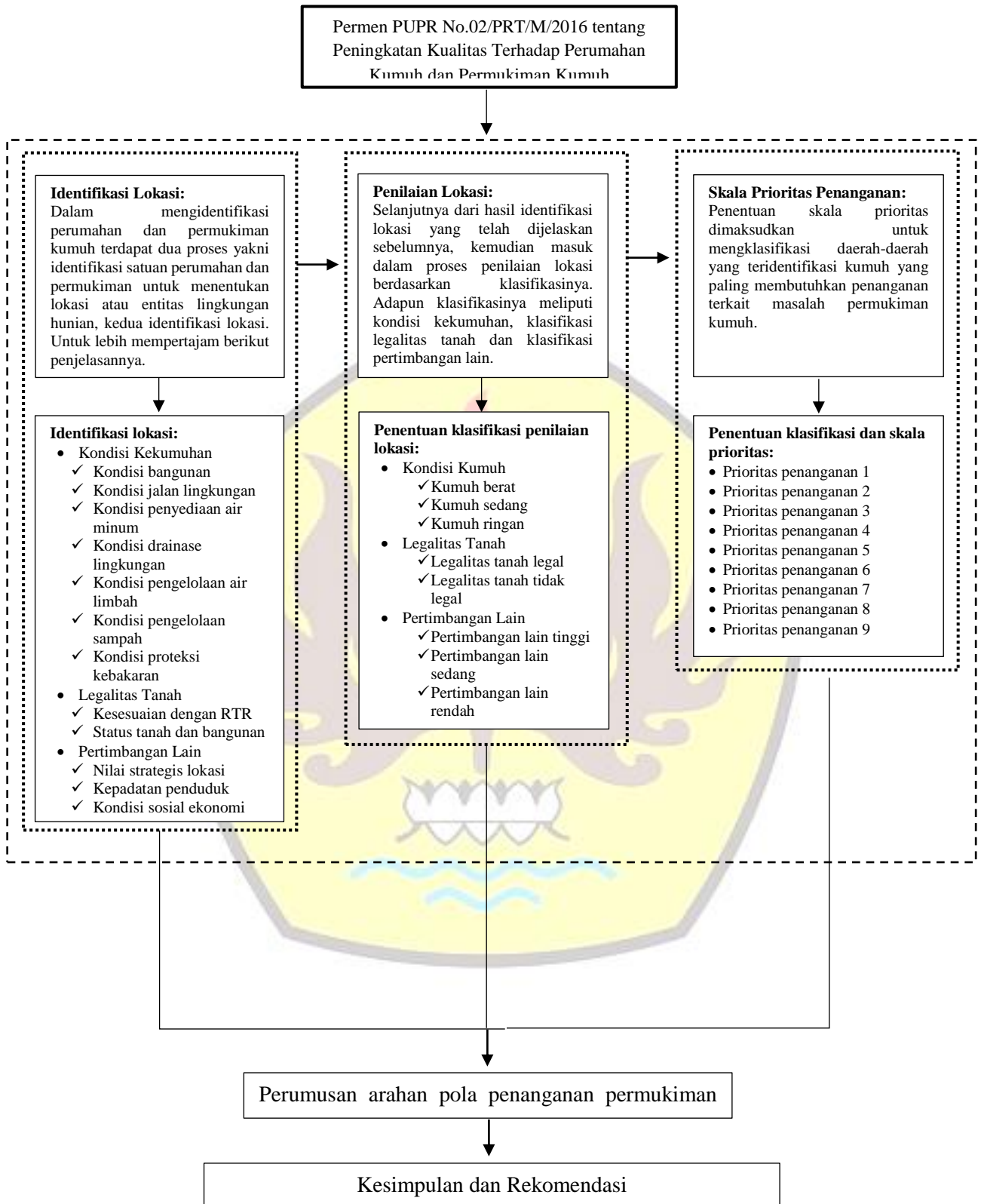
Dalam analisis ini juga dilakukan metode analisis *superimpose* dengan teknik *overlapping maps* pada beberapa analisis seperti penentuan kesesuaian penggunaan lahan dengan arahan tata ruang yang ada, hasil skoring identifikasi lokasi dengan bantuan *Arc GIS tools*.



Gambar 1.2
Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.3
Kerangka Analisis



1.7 Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari bab-bab yang tersusun secara sistematis dalam membahas dan mengkaji masalah penelitian hingga kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, batasan studi, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, kerangka metode analisis, serta sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan terkait kajian penelitian yang ditinjau dari berbagai teori – teori yang berkembang dan kajian pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM

Menerangkan tentang gambaran umum wilayah dan juga mengenai permukiman pesisir yang ada yang akan menjadi data/informasi awal dalam membentuk pemahaman karakteristik, potensi serta permasalahan khususnya kawasan pesisir Kota Gorontalo.

BAB IV ANALISIS

Berisikan tentang rangkaian analisis yang digunakan dalam menilai kondisi lingkungan hunian pada permukiman di pesisir Kota Gorontalo.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil-hasil serta temuan dalam penelitian yang dapat dijadikan informasi baru serta rekomendasi terhadap bentuk penanganan khususnya permukiman kumuh pada pesisir Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

Budiharjo, Eko. 2004. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.

Dahuri, Rokhmin, dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita

Iswandi, R. Marsuki. 2015. *Perencanaan Dan Pengembangan Kota Pesisir Berwawasan Lingkungan*. Unhalu Press.

Luthfi Muta'ali dan Arif Rahman Nugroho. 2016. *Perkembangan Program Penangan Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prayitno, Budi. 2010. *Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rindarjono, Mohammad Gamal. 2012. *Slum: Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kajian Terdahulu:

1. Auliannisa, Dywangga. 2009. *Permukiman Kumuh di Kota Bandung*. Universitas Indonesia.
2. Baun, Paula Issabel. 2008. *Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Kawasan Pesisir Kota Kupang*. Universitas Diponegoro Semarang.
3. Nasikhudin, Akhmad. 2011. *Penataan Permukiman Kawasan Pesisir di kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*. Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

4. Ningsih, Sri Tusnaeni. 2014. *Kajian Tipologi Kekumuhan Permukiman Pesisir di Kawasan Rawan Abrasi Kabupaten Indramayu*. Universitas Pasundan Bandung.
5. Nurazizah, Risyah. 2015. *Strategi Penentuan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Ciloseh Kota Tasikmalaya Berdasarkan Kriteria Kekumuhan*. Universitas Islam Bandung.
6. Nursyamsiyah, Siti, dkk. 2015. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Sains dan Pendidikan, Universitas Lampung.
7. Wiwik W. Osman dan Amalia Paramita. 2013. *Konsep Tata Bangunan pada Permukiman Padat di Kawasan Pesisir Pantai, Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2013, Universitas Hasanuddin dan Universitas Gajah Mada.

Pedoman dan Peraturan Perundangan:

- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Permen Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008, Tentang SPM bidang Perumahan Rakyat
- Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta karya Kementrian PUPR, 2014
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gorontalo Tahun 2014-2034.

- Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Gorontalo Tahun 2013
- Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Gorontalo 2015

Website

Anoname. 2013. *Pengertian Wilayah Pesisir*. Diambil dari: <https://studio6btimbulsloko.wordpress.com/2013/07/14/pengertian-wilayah-pesisir/> (24 Juli 2017)

BPS, 2017. *Kecamatan Dalam Angka*. Diambil dari: <https://gorontalokota.bps.go.id> (22 September 2017)

Nasir, Nurvita. 2014. *Permukiman Nelayan*. Diambil dari: <https://www.slideshare.net/nurvitafnasir/tinjauan-pustaka-permukiman-nelayan> (24 Juli 2017)

Landoala, Tasfir. 2013. *Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Pusat Kota dan Kawasan Pesisir*. Diambil dari: <http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/11/faktor-penyebab-tumbuhnya-permukiman.html> (25 Juli 2017)

